

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Wisata Budaya Museum Wayang Banyumas belum optimal, yang terlihat dari kunjungan yang fluktuatif serta kontribusi retribusi museum terhadap PAD yang masih sangat kecil. Walaupun museum memiliki lokasi strategis dan koleksi khas Banyumasan, implementasi pengembangan belum mampu mengonversi potensi tersebut menjadi daya tarik yang konsisten. Dengan mengacu pada kerangka Van Meter & Van Horn, masalah utama tidak hanya berada pada promosi atau minat wisatawan, tetapi juga pada kesenjangan antara tujuan kebijakan (ekonomi, edukasi, pelestarian) dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan.

Dari sisi dimensi politik kebijakan daerah, temuan menegaskan adanya pola implementasi yang cenderung *top-down*, di mana kewenangan perencanaan dan penganggaran lebih terkonsentrasi pada aktor birokrasi, sementara aktor sosial-budaya (komunitas pedalangan, budayawan, duta wisata, dan masyarakat) lebih sering ditempatkan sebagai pendukung yang sifatnya insidental. Konfigurasi ini berdampak pada politik prioritas dan politik anggaran, yaitu museum relatif kurang memperoleh dukungan memadai dibanding destinasi yang dianggap lebih cepat menghasilkan manfaat ekonomi maupun visibilitas politik (misalnya wisata alam dan wisata buatan). Akibatnya, agenda pengembangan museum tidak bergerak sebagai program strategis jangka panjang, melainkan cenderung *event-based* dan administratif.

Pada tingkat implementasi, dampak dari struktur tersebut terlihat pada beberapa variabel kunci, yaitu keterbatasan sumber daya (SDM pengelola yang sangat minim dan belum tersertifikasi permuseuman, fasilitas pendukung yang belum lengkap, serta kapasitas promosi digital yang terbatas), koordinasi yang lebih instruktif daripada deliberatif, dan lingkungan sosial-ekonomi yang belum kondusif. Persepsi sebagian masyarakat terhadap kawasan pendopo sebagai ruang sakral ikut menciptakan jarak psikologis, sementara ekosistem ekonomi kreatif sekitar museum belum terbentuk sehingga museum belum berfungsi sebagai simpul *value chain* wisata budaya. Kondisi tersebut secara langsung menekan kualitas layanan, pengalaman pengunjung, dan peluang kunjungan berulang.

Arah solusi yang dapat ditarik adalah perlunya penguatan implementasi melalui penataan tata kelola kolaboratif dan penguatan kapasitas dasar museum. Pengembangan museum perlu diposisikan tidak hanya sebagai objek retribusi, tetapi sebagai ruang publik budaya yang mengintegrasikan pelestarian, edukasi, dan ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan perlu lebih menekankan konsistensi prioritas, pembagian peran yang jelas antara aktor formal–informal, serta perbaikan sumber daya dan fasilitas yang berorientasi pada pengalaman pengunjung.

5.2 Saran

SARAN KEBIJAKAN: Pemerintah daerah perlu memperkuat keberpihakan kebijakan melalui penajaman prioritas program Museum Wayang Banyumas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, disertai indikator kinerja yang seimbang antara pelestarian budaya, edukasi publik, dan kinerja kunjungan. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme kolaborasi yang lebih terlembaga (misalnya tim/ forum pengembangan museum) agar proses perencanaan tidak sepenuhnya satu arah, melainkan membuka ruang umpan balik pelaksana teknis dan aktor sosial-budaya secara rutin serta terukur.

SARAN PRAKTIS: Pengelola museum perlu memprioritaskan perbaikan aspek yang langsung dirasakan pengunjung, terutama penataan parkir dan aksesibilitas, kelengkapan amenities dasar, serta penyediaan ruang pendukung seperti pojok informasi, ruang kegiatan edukasi, dan ruang UMKM/cenderamata untuk memperpanjang durasi kunjungan dan meningkatkan nilai ekonomi. Di saat yang sama, penguatan layanan harus didukung peningkatan kapasitas SDM (pemanduan, edukasi museum, kurasi sederhana, dan pengelolaan konten digital), serta penyusunan program rutin yang tidak bergantung pada momen seremonial (paket kunjungan sekolah lintas jenjang, tur tematik, workshop, dan pertunjukan berkala).

SARAN AKADEMIK: Penelitian berikutnya disarankan menelaah lebih dalam politik anggaran dan proses penentuan prioritas (relasi eksekutif, legislatif, birokrasi) yang mempengaruhi dukungan terhadap wisata budaya, termasuk pemetaan aktor dan insentif kebijakan. Selain itu, studi berbasis pengunjung (misalnya survei kepuasan, persepsi ruang pendopo, dan preferensi pengalaman) dapat melengkapi temuan kualitatif agar rekomendasi pengembangan museum lebih berbasis data kebutuhan pasar. Kajian komparatif dengan museum daerah lain juga penting untuk mengidentifikasi praktik baik (*best practices*) tata kelola kolaboratif dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif di destinasi wisata budaya.